

PERSEPSI LAKI-LAKI LAMPUNG TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK

Dwi Wahyu Handayani, Yuni Ratnasari, Gita Paramita Djausal

Dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Lampung

Dosen Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Lampung

Dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Lampung

Email: dutacen@gmail.com

Abstract

In historical background, Lampungnese's culture were positioning women's role in positive and truly appreciated in household. As time went by, either it had shiftment, contraproductive perspective, pro cons about the women's role as in domestic and public, there were in questions. Data showing women's participation in Lampung, specially political participation are low. Women's representative in DPRD Lampung less than 30%. There were 85 members, only 12 were presented by women. Putra daerah was acknowledge as symbolization of men in Lampung. It consequence the domination of men in political institution and governmental office. For strategic position dominated by the Lampungnese's men, although Lampungnese's were not the majority in Lampung. Lampung has multiple tribe with complex cultural diversity. The largest portion were immigrant, Javanese were the largest. It stressed out the research on searching for the background of women's political participation. Our main assumption was looking for relations on perceptions and influences of Lampungnese men's domination and women's role in public, specifically in politics. Using qualitative descriptive and reviewing relevance's theory of feminism. As results, first, in custom tradition system of Lampung, women had the equal opportunity in public, in every area, include politics. Second, Lampungnese's men were flexible in women's options in variant responses. Lampungnese's men were positioning as women's partner in domestic role, it was supporting the women for having public's role. As Marxist feminism, men denied maximalize of women's public role as the consequences of domestic's role. Through structural functional, distribution's of role implicate in limitation of women's political participation. Third, the obstacles were women's capacity (educations and experiences), supports (social groups and politic communication), and political competitions (political intrigue, unfair, and political fault).

Keywords: *Lampungnese, women's participation, political participation*

Abstrak

Budaya Lampung pada aspek sejarah, wanita dipersepsikan berperan sangat positif dan dihargai justru ketika menjadi penegak rumah tangga. Pada perkembangannya apakah mengalami pergeseran, kontraproduktif pandangan, pro kontra tentang wilayah domestik dan publik, ketika perempuan dituntut tanggungjawabnya yang lebih luas. Beberapa data menunjukkan keterlibatan perempuan di Lampung dalam partisipasi politik masih rendah. Keterwakilan perempuan di kursi DPRD Lampung kurang dari 30%. Jumlah keseluruhan 85 kursi, hanya 12 orang perempuan. Sementara itu, laki-laki di Lampung lebih mendominasi kekuasaan di institusi politik dan pemerintahan dengan istilah putra daerah. Dari sekian posisi penting, laki-laki Lampung mendominasi meskipun penduduk asli ini bukan mayoritas di Lampung. Lampung memiliki multi suku dengan budaya yang beranekaragam. Prosentase

terbesar penduduknya adalah suku pendatang, yang sebagian besar adalah Jawa. Maka itu, penelitian mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan Lampung menjadi hal yang menarik. Salah satunya dikaitkan dengan dominasi politik laki-laki Lampung meskipun bukan mayoritas, untuk mengetahui persepsi dan pengaruh terhadap peran perempuan di ranah publik khususnya politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teori yang dipergunakan adalah meninjau berbagai relevansi teori mengenai feminisme. Hasil penelitian adalah pertama perempuan di Lampung dari sistem adat budaya Lampung memiliki kesempatan sama untuk berkiprah di ranah publik, dalam bidang apapun termasuk politik. Kedua, laki-laki Lampung bersikap fleksibel terhadap pilihan perempuan dengan berbagai varian sikap. Laki-laki memposisikan diri sebagai patner perempuan di area domestik, sehingga meringankan langkah perempuan di ranah publik. Laki-laki menolak maksimalisasi peran publik perempuan karena keterikatannya pada peran domestik, karena sikap perempuan menganggap peran domestik bukan hal penting ataupun adanya perjuangan pemikiran feminisme marxis. Hal ini juga terbaca dengan struktural fungsional, tanpa disadari pembagian peran bukan sekedar ranah publik dan domestik tetapi juga terbawa pada ranah publik, adanya pembatasan ruang gerak perempuan dalam berpolitik. Selanjutnya, yang mewarnai dunia politik dengan kualitas feminis atau nama lain adalah ekofeminisme. Ketiga, kiprah perempuan dalam politik Lampung bukan terkendala budaya setempat tetapi lebih kepada kapasitas, dukungan dan persaingan politik. Kapasitas, faktor pendidikan dan pengalaman. Dukungan rendah karena keterbatasan ruang lingkup sosialisasi dan komunikasi politik. Persaingan politik di Lampung tidak mengarah kepada sisi gender, namun lebih kepada intrik politik, tidak fair dan tindakan pelanggaran politik.

Kata Kunci: persepsi laki-laki, Suku Lampung, pengaruh, partisipasi, perempuan dalam politik

PENDAHULUAN

Studi tentang gender yang membahas tentang kuota 30% pada perempuan, lebih banyak menitikberatkan pada proses hadirnya kebijakan afirmasi tersebut, penerapannya dan hasil yang didapat. Tentu saja hasil dari studi tersebut merupakan bukti betapa kebijakan afirmasi kuota 30% pada perempuan ini menyedot perhatian banyak pihak dan memberikan kontribusi pada perjuangan politik perempuan. Namun bagi peneliti, studi tersebut nyatanya belum begitu efektif untuk dijadikan acuan dan pembelajaran bagi perempuan untuk berkiprah secara langsung dalam dunia politik.

Peneliti beranggapan bahwa problematika utama yang dihadapi perempuan, dimulai saat dia memutuskan untuk terjun ke dunia

politik. Masuknya perempuan ke dalam sebuah tradisi atau budaya politik yang telah lama terkonstruksi secara patriarki menjadi faktor utama yang menjadi hambatan bagi perempuan secara nyata untuk berkiprah secara total di dunia politik. Dalam studi ini, peneliti mengkaitkan permasalahan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial dengan salah satu unsur budaya yang diyakini masyarakat sangat fundamental, sensitif dan patriarki, dimana unsur tersebut yakni sistem kepercayaan atau agama. Banyak pihak mengatakan bahwa agama juga memberikan pengaruhnya terhadap budaya patriarki yang dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat.

Pada sisi sejarah, masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Hal ini bisa dibuktikan

dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilihan pertama tahun 1955. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955 hanya ada 3,8 % perempuan di parlemen Indonesia dan tahun 1960-an ada 6,3 %. Angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 yaitu 13 %. Tetapi turun lagi menjadi 12,5 peratus tahun 1992-1997, 10,8 % menjelang Soeharto jatuh, dan hanya 9 % pada periode 1999-2004. Sedangkan pada tahun 2004-2009, hanya ada 11,4 % atau sekitar 63 perempuan saja yang menjadi anggota parlemen (DPR) periode 2004-2009. Padahal jumlah anggota legislatif di Indonesia mencapai 500 orang. Angka ini jelas belum bisa mewakili *power* perempuan agar dapat bergerak lebih leluasa sehingga mampu memperjuangkan aspirasi kaum perempuan secara keseluruhan.

Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik (2004) dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan diantaranya adalah kondisi sosial budaya, dan psikologis yang masih sangat kuat menganggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian peran publik dan domestik. Artinya berdasarkan hal tersebut, batasan peran perempuan tidak lepas dari pengaruh budaya di lingkungannya. Kultur budaya di Indonesia, umumnya masih patrilineal yaitu prinsip keturunan merujuk pada garis bapak, sehingga kedudukan laki-laki dalam keluarga memiliki pengaruh lebih dominan dibanding perempuan.

Demikian juga, pada sistem kekerabatan masyarakat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak dimana kedudukan anak laki-laki tertua memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Anak penyimbang

(pemimpin keturunan) yang berhak dan berkewajiban mengurus adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum menikah. Bila anak perempuan telah menikah maka ia akan mengikuti kedudukan suaminya dalam kekerabatan suaminya.

Perbedaan kedudukan hak dan kewajiban antara kerabat pria dan wanita yang berfungsi sebagai pengatur adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya bersifat membantu. Misalnya dalam adat perkawinan, maka yang berfungsi dan berperan adalah kelompok adat sesuai dengan kedudukan masing-masing gelar. Sedangkan pihak wanita hanyalah bersifat membantu atau mendampingi suami dalam rangka menghormati jalannya upacara adat Lampung Saibatin tersebut. Demikian halnya dalam fungsi dan peranannya dibidang adat yang menyangkut adat kekerabatan.

Dinamika politik dan pembangunan membutuhkan partisipasi publik, baik laki-laki dan perempuan. Pada aspek politik, ternyata peran perempuan di Lampung masih minim. Tafsir masyarakat terhadap budaya setempat, menjadi salah satu faktornya. Apabila melihat dari konteks tafsir budaya masyarakat, akan menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Pada persoalan perempuan dalam politik, maka akan menghasilkan beberapa poin yang sifatnya mendukung atau tidak mendukung aktivitas perempuan dalam politik. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian persepsi laki-laki Suku Lampung terhadap perempuan dalam politik.

Dari penelitian ini, setidaknya akan terjawab beberapa persepsi laki-laki Suku Lampung terhadap perempuan dalam politik. Meskipun, kuantitas perempuan dalam politik, juga dipengaruhi oleh perempuan sendiri.

Selain itu, dalam konteks Lampung, wilayah ini memiliki multi suku dengan budaya yang beranekaragam. Selain Suku Lampung, ada Semendo (sumsel), Bali, Lombok, Jawa, Minang/Padang, Batak, Sunda, Madura, Bugis, Banten, Palembang, Aceh, Makassar, warga keturunan, dan Warga asing (China, Arab, dan sebagainya). Artinya, penelitian ini hanya mampu menjawab sebagian sisi dari kompleksitas persoalan perempuan dalam politik di Lampung.

Masalah Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana persepsi dan pengaruh laki-laki Lampung terhadap peran perempuan di ranah publik khususnya politik?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menjawab dua hal, pertama untuk mengetahui budaya Lampung tentang perempuan dalam politik. Kedua, untuk mengetahui pola persepsi laki-laki Lampung terhadap perempuan dalam politik.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini akan memperkaya kajian partisipasi politik perempuan, budaya politik lokal, dan kesadaran gender. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan andil perkembangan teori gender dan partisipasi politik perempuan dalam konteks persepsi budaya lokal. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang persepsi laki-laki Suku Lampung terhadap perempuan dalam politik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan beberapa catatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Perempuan dalam Politik

Secara etimologis pengertian partisipasi dapat diartikan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara. Adapun menurut Huntington dan Nelson (1990) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Dalam hal meningkatkan partisipasi perempuan dan kualitas wacana, maka pada pemilu 2004 ada aturan quota 30% bagi perempuan untuk duduk di parlemen. Keterlibatan perempuan di dunia politik merupakan tindakan afirmatif (*affirmative action*) guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan. Dari sini diyakini bahwa dengan majunya perempuan keruang publik dan menempati ruang-ruang strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan terwakili. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan gender dan menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perubahan ini diyakini bahwa dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan, menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru yakni bebas diskriminasi. Partisipasi perempuan dalam pemilu masih dimaknai sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat. Mereka dipahami sebagai orang yang dapat dipercaya oleh rakyat, bisa menyampaikan suara rakyat, dan mampu membawa kehidupan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Mayoritas perempuan belum mengerti

pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagi mereka, tidak masalah calon legislatif (caleg) laki-laki atau perempuan asal mau mengerti penderitaan rakyat. Namun, mereka bersepakat bahwa wakil rakyat yang mereka inginkan adalah perempuan yang tidak hanya berjenis kelamin perempuan saja, melainkan perempuan secara idiologis, yakni perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan emosional serta mau dan mampu memperjuangkan agenda perempuan.

Dalam buku Seri Demokrasi (2006) ditekankan bahwa partisipasi perempuan erat kaitannya dengan sistem pemerintahan pusat: tanpa demokratisasi pada tingkat nasional, lingkup gerakan lokal akan terbatas; tanpa perubahan demokratis pada tingkat lokal, kerangka demokrasi nasional akan menjadi *formal shell*. Prinsipnya adalah adanya kesamaan hak dalam kemerdekaan dan pengembangan diri hanya dapat dicapai didalam “masyarakat yang berpartisipasi”, suatu masyarakat yang membantu perkembangan politik, memelihara kepedulian pada masalah kolektif dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan pengetahuan warga negara sehingga mampu mempertahankan kepentingan dalam proses pemerintahan. Adapun ciri khas demokrasi partisipatif adalah:

1. Partisipasi langsung warga negara di dalam pengaturan institusi penting masyarakat, termasuk tempat bekerja dan komunitas lokal.
2. Pengaturan kembali sistem partai dengan membuat anggota partai bertanggung jawab langsung kepada anggotanya.
3. Operasi “partai partisipasi” dalam parlemen atau struktur kongres.

4. Mempertahankan institusi terbuka untuk memungkinkan pengalaman dan eksperimentasi di bidang politik.

Adapun kondisi umum sebagai latar belakang demokrasi partisipatif adalah:

1. Perbaikan langsung sumber daya yang kurang dari banyak kelompok sosial melalui penyaluran kembali sumber daya.
2. Meminimalkan (jika mungkin pemberantasan) kekuasaan birokrasi yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan publik dan pribadi.
3. Sistem informasi terbuka untuk meyakinkan keputusan diinformasikan.
4. Pengkajian ulang peraturan pengasuhan anak agar, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Demokrasi bagaimanapun akan kembali pada masyarakat. Demokrasi mempersyaratkan keterlibatan aktif masyarakat warga untuk menentukan keadaan kehidupan yang sesuai dengan pilihan-pilihannya. Dengan demikian, tidak dapat dimungkinkan sama sekali jika kebijakan publik dalam perspektif desentralisasi tidak memuat nilai-nilai luhur demokrasi. Tjokromidjojo (1992) dalam Putra Fadillah (2003:261) mengatakan bahwa ada tiga elemen yang perlu diperhatikan dalam partisipasi pembangunan, yaitu masalah kepemimpinan, masalah komunikasi, dan masalah pendidikan.

Partisipasi dan kontrol publik dalam proses pembuatan kebijakan publik disini secara tegas dikatakan adalah keterlibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan, dan

bukannya sebatas dengan pendapat atau konsultasi semata. Isu partisipasi perempuan dalam politik dapat dikaji secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dapat dilihat seberapa banyak perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik, dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak langsung dengan hak kewajiban dan kepentingan perempuan. Partisipasi perempuan Indonesia dapat dikatakan rendah kualitasnya disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi politik yang menyebabkan rendahnya pemahaman politik yang mereka miliki. Ini juga dapat disebabkan oleh budaya politik maupun non politik yang tidak menguntungkan.

Menurut Almond dan Verba (1984) sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. Jadi sosialisasi yang berspektif perempuan tentunya adalah proses yang mendukung perempuan berpartisipasi dalam sistem politik. Namun sosialisasi politik bagi perempuan tidak akan terlepas dari budaya baik politik maupun non politik. Dalam sosialisasi politik yang berspektif perempuan yang perlu dikaji adalah

1. Pengambilan keputusan sebagai bentuk pola kekuasaan yang paling awal yang dapat dikaji dalam semua ajang sosialisasi
2. Distribusi hak dan kewajiban yang merupakan masalah klasik dalam ilmu politik
3. Peranan agama dalam sosialisasi budaya politik
4. Peranan ideologi patriarki dalam sosialisasi budaya politik

Kedudukan Perempuan dalam Budaya Lampung

Masyarakat Lampung berdasarkan adat istiadatnya tergolong dalam dua kelompok yaitu masyarakat Lampung beradat Saibatin (Lampung Pesisir/Lampung Peminggir) dan beradat Pepadun. Masyarakat Lampung yang beradat Saibatin terbagi dalam perserikatan adat seperti Kelompok Marga Putih, Kelompok Marga Kelumbayan, Kelompok Marga Pertiwi, Kelompok Marga Limau, Kelompok Marga Badak (Hilman Hadikusuma, 1989:22). Peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat adat Lampung, terutama terlihat pada saat berkeluarga. Budaya yang mempengaruhi peran perempuan dalam keluarganya, ataupun hubungannya dengan suami dan kerabat, ditentukan sejak mulai proses pernikahan. Beragam budaya yang mengatur hal tersebut, tergantung asal kelompok masyarakat adatnya. Dari beberapa budaya Lampung, ada poin-poin yang memperlihatkan dominasi laki-laki mempengaruhi peran perempuan. Pada sisi lain, peran perempuan sebenarnya diakui dalam budaya setempat.

Sistem kekerabatan masyarakat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak dimana kedudukan anak laki-laki tertua memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Anak penyimbang (pemimpin keturunan) yang berhak dan berkewajiban mengurus adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum menikah. Bila anak perempuan telah menikah maka ia akan mengikuti kedudukan suaminya dalam kekerabatan suaminya.

Perbedaan kedudukan hak dan kewajiban antara kerabat pria dan wanita yang berfungsi sebagai pengatur adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya bersifat membantu.

Misalnya dalam adat perkawinan, maka yang berfungsi dan berperan adalah kelompok adat sesuai dengan kedudukan masing-masing gelar. Sedangkan pihak wanita hanyalah bersifat membantu atau mendampingi suami dalam rangka menghormati jalannya upacara adat Lampung Saibatin tersebut. Demikian halnya dalam fungsi dan peranannya dibidang adat yang menyangkut adat kekerabatan.

Peran muda-mudi dalam adat Saibatin setiap upacara adat Lampung Saibatin diundang untuk memberitahukan bahwa akan melaksanakan acara adat dengan cara marut kelapa/acara sekuakhi (saudaraan). Setelah itu perempuan diberi tugas sebagai panitia yang bertanggung jawab dalam acara tersebut sampai selesai.

Dalam adat Saibatin perempuan setelah menikah diberikan gelar bertingkat yaitu pangeran, gelar pangeran adalah gelar penghabisan adat Lampung yaitu gelar adat tertinggi gelar ini didapat oleh seseorang yang berkedudukan tinggi dalam keluarga dan keturunan tersebut. Gelar dalam, gelar dalam adalah gelar dibawah pangeran yaitu gelar adat yang kedudukannya dibawah pangeran. Gelar Batin, gelar batin gelar dibawah dalam yaitu gelar adat yang kedudukannya di bawah dalam. Gelar raja, raden, gelar raja dan raden adalah gelar dibawah batin, yaitu gelar adat yang kedudukannya di bawah batin. Gelar minak. Gelar minak adalah gelar dibawah raden yaitu gelar adat yang kedudukannya di bawah raden. Pemberian gelar ini, hingga saat ini masih diikuti para tokoh adat Lampung Saibatin.

Tujuan gelar tersebut adalah menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang telah menikah

mempunyai atau mendapat gelar telah mempunyai peranan atau kedudukan sesuai gelar dan harus berperan aktif dalam setiap kegiatan acara adat, maupun acara keluarga atau kerabat-kerabat terdekat. Pemberian gelar ini, menunjukkan bahwa peran perempuan juga diakui dalam tatanan adat Lampung Saibatin.

Kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam masyarakat adat Lampung Saibatin apabila seseorang telah bergelar maka telah memiliki kedudukan dalam suatu upacara adat Lampung Saibatin. Salah satu contoh seperti dalam upacara adat perkawinan apabila perempuan yang telah mempunyai gelar maka ia harus berperan aktif dalam suatu upacara adat Lampung, dan apabila yang belum mendapat gelar maka tidak boleh ikut campur dalam upacara adat tersebut. selain itu juga peranannya dalam keluarga asal dalam adat pernikahan yaitu sebagai kelama.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti berupaya mengetahui pendapat umum tentang pola pendapat laki-laki berisi interpretasi atau pemahaman terhadap budaya lokal yang diyakininya terhadap penilaiannya tentang perempuan dalam politik, sehingga kemudian dapat diketahui beberapa hal kendala perempuan terjun pada dunia politik. Selain itu, dapat ditemukan jawaban rendahnya partisipasi aktif perempuan di parlemen maupun kepala eksekutif, dari sisi pandangan laki-laki suku lokal. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik dokumen, wawancara, dan triangulasi.

PEMBAHASAN

Budaya Lampung tentang Perempuan

Lampung mengenal sebutan masyarakat adat *Saibatin* atau *Pesisir*, yaitu pribumi Suku Lampung yang melaksanakan adat musyawarahnya tanpa menggunakan kursi Pepadun. Sebagian besar dari mereka berdiam ditepi pantai, maka masyarakatnya disebut adat Pesisir. Sementara, masyarakat beradat *Pepadun*, yakni pribumi Suku Lampung yang melaksanakan musyawarah adatnya menggunakan kursi Pepadun. Adat Pepadun, adat istiadat pribumi Lampung Abung Siwo Mego; Abung Siwo Megou, Pubian Telu Suku (termasuk Pubian Dua Suku di Pesawaran) dan Megou Pak Tulang Bawang. Pepadun, tahta kedudukan penimbang atau tempat seorang duduk dalam kerajaan adat. Pepadun biasanya digunakan saat pengambilan gelar kepenyimbangan (pimpinan adat) (<http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1088/suku-lampung>, akses 2 November 2015).

Sistem kekerabatan masyarakat Adat Saibatin di Lampung Selatan, pada umumnya menganut sistem keluarga luas (*extended family*), seperti terlihat dalam satu rumah terdiri dari kakek nenek, ayah ibu, paman bibi, keponakan, anak, dan cucu. Kendatipun dalam satu rumah hanya ada satu keluarga, namun keluarga yang tinggal di rumah-rumah lain dalam pengertiannya tetap sebagai bagian dari keluarga besar (dari *lamban balak* atau rumah besar). Hal ini dapat dilihat dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan keluarga atau kerabat, semuanya akan kembali ke pusat rumah besarnya (*Masyarakat Adat Lampung Saibatin dalam Arus Perkembangan Zaman*, Drs. T. Dibyo Harsono, M. Hum).

Beberapa hal dalam adat Lampung menghargai perempuan melalui simbol-simbol budaya yang ada. Siger merupakan simbol khas Provinsi Lampung. Siger yang menjadi lambang Lampung saat ini merupakan simbolisasi sifat feminin. Pada umumnya, lambang daerah di nusantara bersifat maskulin. Seperti di Jawa Barat, lambang yang dipergunakan adalah Kujang, yaitu senjata tradisional masyarakat Sunda, Kalimantan dengan Mandaunya dan Aceh dengan Rencongnya. Simbol-simbol pada daerah melambangkan sifat-sifat patriotik dan defensif terhadap ketahanan wilayahnya. Saat ini penggunaan lambang siger bukan hanya masalah lambang kejayaan dan kekayaan karena bentuk mahkotanya saja, melainkan juga mengangkat nilai feminisme. Konsep itulah yang saat ini diterapkan dalam simbolisasi Siger. Bagi Masyarakat Lampung, Perempuan sangat berperan dalam segala kegiatan, khususnya dalam kegiatan rumah tangga. Di balik kelembutan perempuan, ada kerja keras, ada kemandirian, ada kegigihan, dan lain sebagainya. Meskipun masyarakat Lampung sendiri penganut garis ayah atau patrilineal. Figur perempuan merupakan hal penting bagi masyarakat Lampung, yang sekaligus menjadi inspirasi dan pendorong kemajuan pasangan hidupnya (<https://id.wikipedia.org/wiki/Siger>, diakses pada 2 November 2015).

Siger bukan hanya melambangkan kemuliaan dan kekayaan saja, tetapi juga mengangkat nilai feminisme. Lampung harus menjadi "ibu" bagi orang-orang pendatang, ramah kepada para tamu yang datang ke Lampung, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan kesuburan dan potensi yang ada di rahim, seperti

seorang ibu yang mencintai anak-anaknya. Hal ini diyakini bahwa sifat seorang wanita yang penuh kasih sayang, menghormati, melindungi, dan mendidik adalah nilai-nilai feminisme yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Lampung

(<http://riaairmapa.blogspot.co.id/2015/09/lampung-dan-siger-nya.html>, akses pada 2 November 2015).

Perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dalam adat Lampung. Hal ini dapat dilihat ketika prosesi adat berlangsung. Muli-muli Lampung diberikan gelar istimewa. Gelar itu bisa memberikan representasi perannya, tidak hanya dalam adat tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan (mulu) didudukkan di Kuto Maro bersama anak perempuan dari Kelama (saudara laki-laki dari ibu) dan dari Menulung (saudara perempuan dari ayah). Muli kita, tidak boleh dibiarkan sendiri (Wawancara dengan Anshori Djausal, akademisi dan pengamat budaya Lampung 1 November 2015).

Perempuan dalam adat lampung adalah sosok sebuah gender yang serba bisa, dalam adat lampung perempuan berkarakter mampu melakukan hampir segala kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki. Karakter perempuan dalam adat lampung itu sendiri adalah berprinsip kuat, tegar dan sosialis. (Zafitra Indra, anggota organisasi kepemudaan 1 November 2015).

Meskipun dalam adat yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat nilai penghargaan pada peran perempuan, namun dengan pola patrilinealnya posisi penentu kepemimpinan perempuan adalah laki-laki, untuk tujuan perlindungan. Itu terlihat pada adat perkawinan Saibatin yang didasarkan atas satu garis keturunan (*descent*), dengan prinsip

patrilineal (garis keturunan ayah). Prinsip garis keturunan ini memiliki konsekuensi bahwa bagi anak perempuan yang menikah harus masuk ke dalam keluarga atau marga suaminya, dan meninggalkan marga asalnya. Harta warisan dalam kelompok kekerabatan ini hanya pihak laki-laki yang berhak, sedangkan pihak perempuan tidak memiliki hak (<http://bpsnt-bandung.blogspot.co.id/2009/07/masyarakat-adat-lampung-saibatin-dalam.html#.VkiUSEeKKI>, akses pada 2 November 2015).

Kedudukan dalam adat biasanya efektif dimulai setelah seseorang menikah, bagi perempuan yg sudah bersuami secara otomatis kedudukannya akan mengikuti kedudukan sang suami. Bagi yang belum berkeluarga kedudukan dalam adat masih mengikuti kedudukan orangtua. Saat ini kultur masyarakat kita baru bergerak dari kultur konservatif tradisional yg masih menempatkan kedudukan wanita di bawah pria menuju kultur modern yg menghargai kesetaraan gender. (Nozie Fialis, wiraswasta di Bandar Lampung, 1 November 2015).

Selanjutnya dalam hal hukum waris adat masyarakat Lampung Saibatin menganut hukum waris mayorat laki-laki, yakni hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan waris dari isteri permaisuri yang telah diadatkan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan, dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarganya. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki (*mupus*), maka dalam hukum adat masyarakat bersangkutan diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus

keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, namun jika tidak ada maka bisa mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya. Pada perkembangan sistem kekerabatan kehidupan masyarakat setempat saat ini, ternyata telah banyak mengalami perubahan. Perubahan di mana hubungan tidak semata tergantung pada satu keturunan darah dan asal-usul suku bangsa, kondisi hubungan perkawinan telah terbuka bagi semua suku bangsa (karena masyarakat di sini telah begitu beragam/majemuk). Perbedaan hak waris secara adat antara anak laki-laki dan perempuan semakin tidak jelas. Masyarakat setempat cenderung memilih pembagian waris menurut hukum-hukum agama dan negara, yakni pihak anak perempuan memiliki hak atas harta warisan orang tuanya. Semenjak terjadinya banyak hubungan perkawinan antarsuku, maka ketergantungan terhadap prinsip garis penerus keturunan dari anak laki-laki cenderung semakin berkurang.

Dalam hukum waris adat Lampung, diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Kemudian anak laki-laki membagikan kepada saudaranya yang lain termasuk saudara perempuan, dengan tujuan anak laki-laki adalah pelindung keluarga. Namun seiring zaman, perlahan bergeser mengikuti hukum agama dan negara karena kadangkala dalam pelaksanaannya hukum adat tidak sesuai harapan, justru anak laki-laki tersebut cenderung menguasai harta waris untuk dia sendiri (wawancara Udo Z. Karzi, wartawan di Bandar Lampung 1 November 2015).

Dari uraian pembahasan ini, menjelaskan bahwa perempuan dalam adat Lampung dihargai dengan memiliki peran luar biasa dalam ranah domestik, sebagai penentu tegaknya tiang rumah tangga. Tetapi perempuan

juga diberikan keleluasaan untuk perempuan berkiprah di ranah publik. Itu terlihat pada penilaian adat bahwa perempuan adalah pekerja keras, tekun, dan gigih. Namun di balik kesetaraan dalam adat itu tetap saja stereotipe budaya, memberikan posisi tinggi pada peran laki-laki dengan prinsip patrilinealnya, yang terlihat pada hukum waris dan perkawinan. Hal inilah yang mempengaruhi relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga termasuk juga publik. Adat Lampung memposisikan laki-laki dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan atas diri perempuan.

Pergeseran Mainstream Budaya Lampung dalam Relasi Perempuan dan Laki-Laki

Gender menyangkut aturan sosial berkaitan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi ini membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada sebagian

masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas sehari-hari. Adat Lampung termasuk fleksibel memperbolehkan perempuan dalam bekerja.

Pada struktur tradisional peladang/petani di Lampung, tetap ada pembagian peran. Laki-laki berperan pada aspek pekerjaan yang membutuhkan fisik penuh. Sementara perempuan bekerja pada lingkup memelihara hingga memperoleh hasil. Kesepakatan ini tanpa disadari terdapat unsur ketidakadilan peran, perempuan bekerja rutin setiap hari, laki-laki insidental karena tidak setiap saat pekerjaan bertani/meladang membutuhkan fisik berat, hanya ketika membuka ladang dan mengangkut hasil panen.

Hal demikian dalam adat Lampung sebenarnya wajar melihat perempuan bekerja maupun berkiprah di ranah publik. Bahkan ketika perempuan melakukan pekerjaannya secara optimal. Ini menunjukkan adat Lampung sangat fleksibel terhadap perempuan. Adat juga memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap peran perempuan dalam ranah domestik.

Dalam ranah domestik, perempuan memiliki peran yang penting. Bagaimana tumbuh kembang anak diperhatikan dan diurus dengan baik. Saudara laki-laki juga memiliki keharusan dalam mengurus saudara perempuannya. Dalam Lampung, tidak ada yang cuek. Tidak boleh. Keminan, atau uwak dan tante, atau saudara perempuan dari ayah itu memberikan peran penting dalam urusan keponakannya. Mereka yang duluan 'ribut' kalau keponakannya berada

dalam masalah. Harus saling peduli dalam keluarga, itu yang utama dalam hubungan orang Lampung. (Anshori Djausal, akademisi dan pengamat budaya lokal, wawancara pada 1 November 2015).

Peranan Perempuan dalam keluarga seperti yang dapat saya lihat dan katakan bahwa perempuan dalam adat Lampung dapat dikatakan seorang yang perkasa dan serba bisa. Perempuan dalam hal ini merupakan sebuah sosok yang penyayang, tegar, tekun dan berprinsip tinggi. Dari sosok orang tua merupakan sosok yang berprinsip tinggi, memprioritaskan anaknya, penopang ekonomi selain kepala keluarga dan penyabar. Dari sosok adik tidak jauh berbeda dimana nilai nilai dari sebuah sosok perempuan itu di tanamkan oleh orang tua kepada anak perempuannya sebagai pedoman hidupnya. (Zafitra Indra, anggota organisasi kepemudaan, wawancara pada 1 November 2015).

Artinya perempuan dalam persepsi adat Lampung memiliki *double of role* yaitu sebagai ibu atau anak perempuan sekaligus sebagai pekerja, atau dituntut perannya dalam ranah domestik dan publik. Adanya pola tersebut pun sudah ada pada sosialisasi dan pembiasaan pada keluarga Lampung.

Dalam perjuangan gender, upaya keadilan dan kesetaraan harus tercapai. Kesetaraan gender bahwa kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially*

valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results. (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

Keadilan gender, suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “**Gender Equity** is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki).

Dalam banyak budaya tradisional, perempuan ditempatkan pada posisi yang dilirik setelah kelompok laki-laki. Fungsi dan peran yang diemban perempuan dalam masyarakat tersebut secara tidak sadar biasanya dikonstruksikan oleh budaya setempat sebagai warga negara kelas dua.

Adat Lampung tentang relasi perempuan dan laki-laki di rumah tangga, ada pembagian peran yang penting antara laki-laki dan perempuan. Itu merupakan kesepakatan dan menjadi bagian dari budaya. Perempuan lebih kepada peran perhatian dan laki-laki pada peran sebagai pelindung. Harapan keluarga Lampung terhadap anak perempuan sangat tinggi. Itu terlihat dari pembiasaan sejak kecil, bahwa

perempuan dituntut untuk mengenali dirinya sebagai seorang yang suka bekerja, penyayang, tegar, tekun dan memiliki prinsip.

Peranan Perempuan dalam keluarga seperti yang dapat saya lihat dan katakan bahwa perempuan dalam adat Lampung dapat di katakan seorang yang perkasa dan serba bisa. Perempuan dalam hal ini merupakan sebuah sosok yang penyayang, tegar, tekun dan berprinsip tinggi. Dari sosok orang tua merupakan sosok yang berprinsip tinggi, memprioritaskan anaknya, penopang ekonomi selain kepala keluarga dan penyabar. Dari sosok adik tidak jauh berbeda dimana nilai nilai dari sebuah sosok perempuan itu di tanamkan oleh orang tua kepada anak perempuannya sebagai pedoman hidupnya (wawancara dengan Zafitra Indra anggota organisasi kepemudaan, 2 November 2015).

Tidak ada masalah. Sewajarnya saja perempuan berperan dalam publik (wawancara dengan Anshori Djausal akademisi dan pengamat budaya Lampung, 1 November 2015).

Peranan perempuan dalam ranah publik merupakan sebuah sosok yang bersosial tinggi, ramah, mudah bergaul, penolong dan berprinsip tinggi. (wawancara dengan Zafitra Indra anggota organisasi kepemudaan, 2 November 2015).

Dinamika budaya selaras dengan perubahan lingkungan yang ada. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan sosial, membentuk mainstream baru yang menumbuhkan pergeseran nilai-nilai masa lalu yang lebih adaptif dengan nilai kekinian. Hal itu sebagian besar terlihat pada masyarakat perkotaan yang sudah mengurangi intensitas pengaruh budaya lokal. Demikian juga modernitas pemikiran

pada relasi perempuan dan laki-laki lahir dari pluralisme budaya di Lampung dan lingkungan sosial ekonomi, sehingga mulai memudahkan stereotipe pembagian peran tradisional. Inilah sebenarnya ruang bagi kepemimpinan perempuan di ranah publik.

Perspektif adat Lampung dalam pandangan budaya mempengaruhi secara tidak langsung dalam cara berinteraksi yaitu secara habit atau kebiasaan. Kebiasaan ini cenderung dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, budaya dan lingkungan, namun pengaruh dalam interaksi ini dapat dikatakan dipengaruhi besar oleh lingkungan dan keluarga itu sendiri. Sehingga pengaruh budaya itu sendiri cenderung hanya sebagian kecil dalam perempuan adat lampung yang saya ketahui (wawancara dengan Zafitra Indra anggota organisasi kepemudaan pada 1 November 2015).

Pola Persepsi Laki-Laki Suku Lampung terhadap Perempuan dalam Politik

Fenomena relasi perempuan dan laki-laki menyadari bahwa gender ternyata ada dalam konsep sosial masyarakat. Dalam paparan Sugiarti (2003) menyimpulkan bahwa di dalam masyarakat selalu ada mekanisme yang mendukung konstruksi sosial budaya gender. Beberapa kecenderungan di masyarakat dan keluarga yang menyebabkan terjadinya gender adalah pemosisian peran anak laki-laki dan anak perempuan yang berbeda, baik dalam status, peran yang melekat ataupun hak-hak yang sebenarnya merupakan hak universal. Sikap fleksibel laki-laki Lampung dalam interpretasi budaya menjadi modal sosial

bagi perempuan dan kiprahnya dalam dunia politik.

Dinamika masyarakat sekarang sudah jauh berkembang. Perempuan terlibat dalam parpol, organisasi keagamaan atau lainnya itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah jauh berkembang (wawancara dengan Anshory Djausal akademisi dan pengamat budaya Lampung, 1 November 2015).

Budaya Lampung telah membiasakan anak perempuannya terdidik secara baik, menjadi perempuan yang penyayang, teguh dan berprinsip. Dalam politik, ini akan menjadi nuansa yang baru untuk dinamika politik di Lampung.

Saat ini seorang terjun dalam dunia politik karena motivasi ekonomi dan menjadikannya sumber mata pencaharian bagi sebagian kalangan terutama politikus muda. sementara wanita yg terjun ke dunia politik lebih kepada motivasi sosial (wawancara dengan Nozie Fialis wiraswasta di Bandar Lampung, 3 November 2015).

Peranan perempuan dalam partai politik dalam hal ini adalah perempuan sebagai bagian program pemberdaya dan peranan perempuan. Program ini memberikan perempuan kesempatan dan serta mendorong perempuan dalam kehidupan lingkungan untuk berperan aktif tanpa melihat kelebihan dan kekurangan dari sisi gender. Peranan ini antara lain seperti yang telah di lakukan adalah pertama mencerdaskan anak bangsa dimulai dari ranah keluarga sampai dengan sosial lingkungan terdekat mereka. Kedua mendukung perekonomian yaitu perempuan sebagai pencetus dunia usaha kreatif dimana perempuan dalam hal ini sebagai sosok yang peka terhadap unsur kesenian untuk menggalakkan sektor perekonomian dari segi entrepreneur

bidang usaha kreatif. Ketiga melakukan pemberdayaan perempuan, ini merupakan program mereka sosok perempuan yang telah mampu menjadi sosok pedoman bagi kaum perempuan lainnya. Mereka memberikan bimbingan dan pembelajaran untuk kaum perempuan. Hal ini sebagai *trigger* bahwa kaum perempuan itu sendiri mampu melampaui batas harapan mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. (Zafitra Indra anggota organisasi kepemudaan pada 1 November 2015). Sumberdaya efektif dalam politik adalah adanya dukungan. Itu diakui masih minim dukungan untuk perempuan berpolitik di Lampung. Selain masih kurangnya kesempatan, para wanita perlu diberikan motivasi untuk bisa berkancah di dunia politik. (wawancara dengan Nozie Fialis wiraswasta di Bandar Lampung, 3 November 2015).

Selain itu, peran ganda perempuan dapat menjadi pilihan maupun tantangan. Perempuan ditempatkan pada sebuah dilema ketika memilih, konsisten dengan beban tanggungjawab domestik atautkah publik. Ini akan mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan peran akibat beban tanggungjawab berlebih. Pernyataan untuk memperbolehkan perempuan aktif di ranah publik, maka akan semakin gencar tuntutan agar tetap ingat kodrat sebagai ibu dan istri.

Peranan perempuan yang utama adalah sebagai ibu yang mengurus rumah tangga. Jika perempuan ingin masuk dalam politik, dia tetap harus mengutamakan moral dan agamanya. Itu diperlukan agar tidak mudah tergerus. Idealisme itu perlu agar membentuk karakter politikus. Kalau perempuan mau terjun dalam politik, bisa saja, tapi perannya dalam

pengambilan kebijakan dan implementasi tidak akan maksimal. Perempuan kan yang kita tahu mereka lebih mengutamakan perasaan. Dalam mengambil kebijakan, harus pakai akal. Laki-laki yang juga pada umumnya lebih mengutamakan akal, pemikiran. Dalam politik ini kita menekankan pada fakta-fakta yang ada. Tidak maksimal yang dimaksud itu, semisalnya kita mau sidak ke tempat hiburan malam. Kalau yang laki-laki bisa saja. Kalau perempuan, kalau sudah jam 8, dia harus pulang karena kewajibannya di rumah. Kodratnya tidak memungkinkan dia untuk berada luar rumah di waktu malam. Terkait ajaran agama juga kan, kalau mau keluar malam, dia harus ditemani muhrimnya. Keterlibatan perempuan dalam politik di Lampung ini, *sah-sah saja*. Asalkan tidak melanggar norma-norma dan adat istiadat. Tapi memang tiap daerah ya berbeda-beda (wawancara dengan Septrizo Arya, anggota parpol, 4 November 2015).

Sangat dimungkinkan, namun dalam hal ini ada catatan dalam kepemimpinan dalam jabatan politik itu sendiri. Catatan ini adalah sebuah karakter dari kepemimpinan yaitu konsistensi, dedikasi, kerja keras dan team work yang tinggi. Dari sebuah pengalaman yang pernah saya sendiri jalani, ranah politik sendiri merupakan ranah yang bisa dibilang mempunyai persaingan yang keras dan ketat. Dalam Lampung itu sendiri kental dengan budaya adat yang menjunjung tinggi anak laki-laki sebagai penerus dan pemimpin keluarganya. Sebuah tindakan persuasif dalam hal ini sangat mungkin dilakukan bagi perempuan untuk masuk dalam lingkungan ini yaitu dengan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh perempuan secara nyata pada lingkungan daerah Lampung pada kasus

ini. Saya sendiri adalah pemilih yang melihat dari hasil apa yang telah dilakukan oleh kandidat lampung dan apa kontribusinya terhadap daerah lampung itu sendiri. Sehingga gender disini bukan merupakan sebuah masalah yang sangat penting selama integritas dan kontribusi kandidat perempuan itu sendiri dalam masyarakat itu ada (wawancara dengan Zafitra Indra Usia : 29 tahun Pekerjaan : anggota organisasi kepemudaan, 4 November 2015).

Menurut pengalaman, perempuan yang terjun ke politik lebih mengutamakan yang kultur. Maksudnya dia mengembangkan potensi daerah melalui pariwisata atau pendidikan. Kalau laki-laki, seluruh aspek dia lakukan, seperti juga aspek hukum (wawancara dengan Septrizto Arya anggota partai politik, 4 November 2015).

Selanjutnya peluang keterpilihan perempuan dalam politik di Lampung juga sebanding dengan laki-laki. Memilih kandidat laki-laki atau perempuan landasannya bisa beragam. Kalau kandidatnya 2 orang, ya, peluangnya 50-50 wawancara dengan Anshori Djausal akademisi dan pengamat budaya Lampung, 1 November 2015).

Perempuan sebagai kandidat ajang pemilihan disini bagi saya tidak terlihat sebagai sosok jenis kelamin. Melainkan sebagai sosok kepribadian, kontribusi dan dedikasinya terhadap masyarakat dan perekonomian (Zafitra Indra Usia : 29 tahun Pekerjaan : anggota organisasi kepemudaan, 2 November 2015).

Sikap perempuan berpolitik memang dianggap wajar dan boleh. Namun terdapat juga persepsi yang menilai tentang arena peran yang terbaik bagi perempuan di luar politik. Hal ini terkait peran utamanya dalam ranah domestik. Ketika perempuan

lebih konsisten di ranah domestika, maka aspirasi perempuan dapat disampaikan melalui LSM atau organisasi pada isu anak, perempuan dan pendidikan. Menurut persepsi ini, dunia politik/lembaga politik bukan satu-satunya strategi untuk pencapaian isu politik perempuan.

Supaya suara perempuan terwakilkan, kan bisa saja melalui LSM atau organisasi lain yang bergerak di isu anak, perempuan, atau pendidikan. Pilihlah organisasi yang bisa sinergi dengan kepentingannya. Peluang terpilihnya sebagai ketua, ketika kandidat ada laki-laki perempuan, peluang perempuan kecil. Sejauh ini juga, keterlibatan perempuan dalam politik hanya 10%. Kalau jumlah anggota dewan total 45 orang, ya maksimal yang perempuan hanya ada 5 orang. Tapi secara umum, kalau perempuan mau berperan dalam politik, sah-sah saja (wawancara dengan Septrizto Arya anggota partai politik, 4 November 2015).

Penilaian lainnya tentang perempuan dalam politik adalah mengenai karakter universal perempuan, yang sebenarnya itu lebih dihasilkan dari pendidikan keluarga dan formalnya.

Saya sendiri melihat perempuan dalam parlemen dan eksekutif disini sebagai pemrakarsa bidang pendidikan dimana hal ini merupakan karakter yang saya ketahui yaitu penyayang dan tekun dan sabar. Saya dalam hal ini melihat sosok perempuan yang cenderung melihat sebuah keputusan dengan begitu banyak pertimbangan sehingga hal-hal yang yang menyangkut ketegasan dalam bidang2 tertentu maasih belum dapat dilakukan oleh perempuan (wawancara dengan Zafitra Indra anggota organisasi kepemudaan, 2 November 2015).

PEMBAHASAN: STRUKTURAL-FUNGSIONAL, MARXIS, EKO-FEMINISME DAN PERJUANGAN GENDER

Dari hasil penelitian tergambar jelas bahwa laki-laki Lampung memiliki persepsi yang fleksibel terhadap peran perempuan. Perempuan tidak masalah berkiprah di ranah publik, termasuk politik. Ketika perempuan ada dalam dunia politik, maka persepsi pun beragam, memperbolehkan tetapi beragam persyaratan yang membebani. Tuntutan itu adalah berkaitan kodrat tugas domestik, kualitas perempuan dan adanya pembatasan ruang politik bahwa perempuan lebih kepada gerakan *low politic* dibanding laki-laki. Perempuan dihindarkan dari persaingan saat pemilihan maupun dalam lembaga politik. Dalam hal ini peneliti menyatakan bahwa masih ada pembagian peran dalam ranah public, secara tidak langsung teori structural fungsional menjadi relevan meskipun teori itu sebelumnya lebih membahas perbedaan peran domestik dan publik.

Masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman (Nasaruddin Umar, 1999: 60), cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral. Demikian dalam konteks politik Lampung, semakin kentara persaingan politik yang tidak fair terhadap kualitas, maka akan semakin menyulitkan perempuan ada dalam dunia tersebut. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik disebabkan bukan kepada bias gender dan dukungan tetapi pada persaingan politik yang tidak sehat.

Laki-laki Lampung yang menginterpretasikan budaya juga bijak

dalam mensikapi kesetaraan gender dalam hak politik. Perempuan diharapkan tidak mengabaikan eksistensi keluarga, sebuah penolakan bagi feminisme sosialis/marxist yang melakukan penyadaran kepada para perempuan bahwa mereka adalah kelas yang tidak diabaikan dalam membangun egaliter, dan eksistensi keluarga dan tentang status dan peran ibu sebagai “budak” dan “mengalami alienasi”.

Laki-laki berharap perempuan dalam politik justru melestarikan kualitas feminis melalui perjuangan social cultural atau pun *low politic*. Hal ini sebagai respon terhadap dinamika politik yang tidak fair, bernuansa money politik dan pelanggaran kode etik politik lainnya. Ekofeminisme memperjuangkan kualitas feminim mengkritik para feminis yang menyuruh perempuan membuang nature, karena dengan semakin banyaknya para perempuan yang mengadopsi kualitas maskulin, maka dunia tetap berstruktur maskulin, yaitu identik dengan penindasan. Perempuan untuk bangkit melestarikan kualitas feminin agar dominasi sistem maskulin dapat diimbangi sehingga kerusakan alam, degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan dapat dikurangi.

Sementara relasi gender yang harmonis mulai dari tingkatan keluarga sampai dengan masyarakat, yaitu harus ada komunikasi dan perilaku saling menghargai, saling menghormati dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keharmonisan dan bukan menciptakan persaingan dan permusuhan. Tanpa harus menjejakkan pemikiran pada teori feminisme yang sudah diulas di atas. Dunia politik mestinya jujur, adil dan bersih, sehingga sesuai untuk orang-orang yang memang memiliki kualitas sebagai pemimpin politik, baik untuk perempuan dan laki-laki. Tujuan politik

mestinya adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat bukan kepentingan individu ataupun kelompok.

V. KESIMPULAN

1. Perempuan di Lampung sebenarnya dari sisi adat budaya telah memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah di ranah publik, dalam bidang apapun termasuk politik. Hal itu berakar dari budaya Lampung yang secara adat telah memposisikan perempuan dalam peran yang terhormat.
2. Pandangan bahwa perempuan dalam rumah tangga harus memiliki kepatuhan terhadap laki-laki dalam hal ini suami memang tetap melekat, terutama dalam pengambilan keputusan seberapa besar perannya di ranah publik. Sementara pekerjaan domestik, dalam keluarga Lampung antara laki-laki dan perempuan sudah ada saling kompromi untuk saling membantu.
3. Kiprah perempuan dalam politik Lampung bukan terkendala budaya setempat tetapi lebih kepada kapasitas dan dukungan dan persaingan politik. Kapasitas berkaitan dengan faktor pendidikan dan pengalaman untuk menunjang dinamika perannya dalam politik. Dukungan berkaitan perempuan masih rendah karena keterbatasan ruang lingkup sosialisasi dan komunikasi politik. Ketiga, persaingan politik di Lampung tidak mengarah kepada perspektif gender namun lebih kepada intrik politik itu sendiri. Artinya korelasi dari penelitian ini adalah rendahnya partisipasi

perempuan dalam dinamika politik elit di Lampung adalah faktor kapasitas dan dukungan mempengaruhi kebershasilannya dalam persaingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. Verba, Sidney. 1984. *Budaya Politik*, Jakarta : Bina Aksara.
- Fadillah. Putra. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Averroes Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Bandung : Mandar Maju.
- Harsono, Dibyo. 2015. *Masyarakat Adat Lampung Saibatin dalam Arus Perkembangan Zaman*. <http://bpsnt-bandung.blogspot.co.id/2009/07/masyarakat-adat-lampung-saibatin-dalam.html> #VklUSEeKKI, akses pada 2 November 2015.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Indonesiatara : magelang, 2004. fkip.unila.ac.id/ojs/data/journals/13/.../YUNIDAARYAN I.d...diakses tanggal 17 Maret 2013. <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1088/suku-lampung>, akses 2 November 2015.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1999. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiarti dkk. 2003. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*, Malang : UMM Press <http://Pengertian%20Politik.htm>, akses pada 2 November 2015.

- _____. 2006. *Buku Seri Demokrasi Edisi I. 2006. Demokrasi: Sejarah, Praktik, dan Dinamika Pemikiran*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID's Averreos dan KID kerjasama dengan Averroes Press.
- _____. 2015. <https://id.wikipedia.org/wiki/Siger>, akses pada 2 November 2015.
- _____. 2015. *Lampung dan Sigernya*. <http://riaairmapa.blogspot.co.id/2015/09/lampung-dan-siger-nya.html>, akses pada 2 November 2015.